SOAL PERMINTAAN MAAF BAND SUKATANI

Polisi Terima Kritik untuk Evaluasi

JAKARTA (KR) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kepolisian tidak antikritik dan menerima kritik sebagai masukan untuk evaluasi. Kritik itu menjadi pemantik bagi kepolisian untuk memperbaiki institusi agar menjadi lebih baik lagi.

"Dalam menerima kritik, tentunya kami harus legawa dan yang penting ada perbaikan. Dan kalau mungkin ada yang tidak sesuai dengan hal-hal yang disampaikan, bisa diberikan penjelasan," ucap Kapolri di Jakarta, Jumat (21/2). menanggapi adanya permintaan maaf dari band Sukatani kepada Polri terkait lirik lagu mereka yang berjudul 'Bayar Bayar Bayar' yang membahas mengenai oknum polisi.

Menurut jenderal bintang empat itu, prinsipnya Polri terus berbenah untuk melakukan perbaikan dengan memberikan punishment (hukuman) kepada anggota yang melanggar dan memberikan rewards (penghargaan) kepada anggota yang baik dan berprestasi. Upaya berbenah itu,merupakan komitmen Polri untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kekurangan yang ada. "Tentunya itu (perbaikan, red.) menjadi upaya yang terus kami lakukan," tegasnya.

Terkait permintaan maaf dari band Sukatani kepada Polri mengenai 'lagu Bayar Bayar Bayar', Kapolri menduga ada miskomunikasi. "Tidak ada masalah. Mungkin ada miss, tapi sudah diluruskan," ucapnya.

Diketahui, band punk asal Purbalingga Sukatani, menyampaikan permintaan maaf kepada kepolisian melalui video di akun media sosial mereka terkait lagu mereka yang berjudul 'Bayar Bayar Bayar'. Dalam unggahan media sosial band tersebut, dua personel band Sukatani, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Polri atas lirik lagu Bayar Bayar Bayar. "Dengan ini, saya mengimbau kepada semua pengguna platform media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul 'Bayar Bayar Bayar', lirik lagu bayar polisi, agar menghapus dan menarik semua video yang menggunakan lagu kami karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami," ujarnya.

(Ant/Has)-f

PDIP

Sambungan hal 1

Caroline mengatakan, jumlah kepala daerah yang banyak dari PDIP itu dapat meningkatkan kekuatan partai apabila respons publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah saat ini melemah. "Artinya, ini menjadi semacam investasi politik ke depan untuk menunjukkan eksistensi PDIP," ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti melihat akan ada kesulitan bagi pemerintahan Prabowo untuk mengorkestrasi hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hal itu mengingat jumlah kepala daerah PDIP yang cukup besar, maka ketidakharmonisan pemerintah pusat dan daerah dapat menanggung capaian-capaian kesuksesan pemerintah pusat.

"Sebut saja program MBG, akan direspons biasa saja oleh pemerintah daerah. Khususnya pemerintah daerah yang berasal dari PDIP," jelas Ray.

Menurutnya, langkah Megawati menarik kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk tidak mengikuti retret, juga berarti pemerintah daerah dari PDIP akan lebih luwes jika berhubungan dengan pemerintah pusat. Apalagi, dana transfer daerah telah dipotong sekitar 50 persen.

Ray menyebut pemerintah daerah akan merasa lebih terbuka untuk tidak selalu sejalan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kekuatan pemerintah daerah dari PDIP menjadi salah satu kekuatan dan daya tawar PDIP untuk mengoposisi pemerintahan Prabowo.

(Ant/Obi) -d

DPMKKPS

Sambungan hal 1

Output yang dihasilkan berwujud rekomendasi kepada setiap kalurahan, untuk dituangkan dalam Rencana Aksi Kalurahan serta masuk ke dalam Rencana Anggaran Belanja Kalurahan.

Ia menambahkan, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, pendekatan RBKal terdiri atas 16 kegiatan utama, dan pendekatan RPMKal mencakup lima kegiatan utama. "Bila dijalankan sesuai petunjuk teknis, fungsi Binwas Kapanewon bisa berangkat dari rekomendasi-rekomendasi capaian RKal yang diberikan oleh kapanewon pada kalurahan, apakah ditindaklanjuti atau tidak," imbuh Kanjeng Yudanegara.

Kanjeng Yudanegara mengingatkan, lurah memiliki perjanjian kinerja untuk menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Pendapatan Asli Kalurahan.

"Sehingga pembangunan di kalurahan harus benar-benar punya impact. Bicara konkret saja, apakah angka kemiskinan di kalurahan turun atau tidak, angka stunting turun atau tidak, pelayanan publik sudah memuaskan belum, dan BUMKal-nya sudah memberikan pemasukan pada PADes atau belum, lalu ada peningkatan tidak tiap tahunnya," katanya.

Salah satu peserta Bimtek Asesmen Tahunan Reformasi Kalurahan Rini Nurhidayati yang menjabat Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Sayegan, Sleman, saat ditemui di lokasi acara, Hotel Prima SR, Sleman, Kamis menjelaskan, pada 2024 pihaknya membuat asesmen awal melalui aplikasi Sistem Informasi Kalurahan (Sinkal). Selanjutnya pada 2025 ini pihaknya membuat asesmen tahunan di rentang waktu Januari hingga Maret, lalu memberikan rekomendasi kepada kalurahan.

"Ini hal baru, biar lebih jelas dilakukan Bimtek. Acara ini membantu kami untuk bisa memahami apa yang harus kami lakukan. Apalagi di acara ini juga ada petunjuknya," kata Rini.

Rini mengatakan, Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan ini memiliki lima indikator yaitu kemiskinan, stunting, kebudayaan, perekonomian dan lingkungan. Jawatan Kemakmuran yang diampunya berada pada sektor perekonomian dan lingkungan, sementara kemiskinan, stunting, kebudayaan ada di Jawatan Sosial Kapanewon.

Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Kalasan, Sleman Gusnav Faifan mengatakan hal serupa. Melalui Bimtek Asesmen Tahunan ini pihaknya dapat dengan jelas melakukan Binwas Reformasi Kalurahan. Ia pun merasa terbantu dengan penjelasan teknis dalam acara Bimtek ini.

"Membantu karena Bimtek ini kita tahu indikator sebagai pegangan di lapangan. Kalau tidak punya pegangan kita gak tahu mau apa. Kalau di Bimtek ini kami tahu apa yang harus dilakukan," katanya.

(*)-d

Kabur

Sambungan hal 1

lowongan pekerjaan tidak sebanding, berdampak pada tingkat pengangguran sarjana pada tahun Agustus 2024 tercatat 842.378 orang.

Ketika Wamennaker berkomentar "Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi", adalah tanggapan yang sangat emosional dan menunjukkan ketidakmampuannya menyelesaikan persoalan dengan membuka lapangan pekerjaan. Apalagi komentar Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan jika anak-anak Indonesia di luar negeri hanya second class dan tidak bisa menjadi first class. Pernyataan yang sangat tendensius dan tidak menampakkan kearifannya.

Banyak anak-anak muda berkomentar, lebih baik second class tetapi bisa hidup sejahtera dan berkontribusi pada orangtua atau keluarga di Indonesia, daripada first class hanya memiliki upah UMR dan siapa yang menjadi fisrt class di negeri ini?

Para pejabat ini cara berpikir hanya menggunakan 2 variabel X dan Y, maka layaklah PISA dalam dunia pendidikan kita tidak beranjak untuk meningkatkan peringkatnya.

Beda dengan komentar Mendikti Satryo, saat menjabat, yang menyatakan bahwa penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak wajib pulang ke Indonesia setelah lulus kuliah di luar negeri. Cara berpikir yang rasional karena melihat data dan menganalisisnya, namun hal ini disoroti beberapa pihak dengan komentar negatif: sudah dibiayai negara tidak mau berkontribusi dan tidak nasionalis. Kembali lagi cara berpikir yang sempit didendangkan oleh banyak pihak yang tidak mampu melihat realitas yang ada.

#kabursajadulu tidak akan diikuti secara berbondong-bondong anak-anak Indonesia, tetapi sebagian besar yang kabur adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam hal bahasa, komunikasi, keterampilan khusus untuk bersaing dengan tenaga asing, mereka yang telah melihat peluang di negara lain, dan tentunya mereka yang tangguh dan siap menghadapi tantangan kehidupan.

Fenomena brain drain di Indonesia akan berdampak pada defisit tenaga kerja berkualitas kendati masih berada dalam fase bonus demografi.

Demo mahasiswa "Indonesia Gelap" sebenarnya ingin memberi kesadaran kepada setiap pejabat, kabinet Prabowo Gribran untuk serius bekerja, memberikan peluang kerja bagi generasi muda, mengubah dunia pendidikan yang berkualitas, memberantas korupsi, mengubah perilaku pejabat dan kepolisian untuk berpihak pada masyarakat. Anggaran dipangkas bukanlah sebuah alasan untuk tidak berkontribusi, tetapi harus disikapi dengan cerdas. Keputusan batas usia pensiun PNS dan PPPK berkisar antara 60-65 tahun, hal ini menjadi beban negara, yang seharusnya sangat selektif yaitu ASN harus orang-orang yang pintar dan punya integritas.

Perbaikan pendidikan di Indonesia agar terjadi peluang kerja yang sebanding dengan lulusan bisa dengan: 1. Mahasiswa di keguruan harus putra-putri Indonesia lulusan SMA yang terbaik seperti di Finlandia, Singapura dan yang lain.

2. Menerjemahkan buku-buku asing yang berkualitas ke dalam bahasa Indonesia seperti yang dilakukan oleh Korsel, sehingga masyarakat khususnya para guru mampu mengakses pengetahuan secara cepat dan luas, sehingga berdampak pada tingginya tingkat pembelajaran.

3. Jika di perusahaan ganti CEO, maka tugasnya meningkatkan kinerja karyawan supaya bisa mencapai profit maksimal, tetapi seringkali menteri hanya ingin dikenang maka ada ungkapan ganti menteri ganti istilah.

4. Perguruan tinggi hanya boleh membuka jurusan sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan dan dibatasi.

(Penulis, Dosen dan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis dan Ekonomi FBE UAJY).-d

PELUNASAN HAJI DIBUKA

BSI Siap Layani 185.000 Calhaj

JAKARTA (KR) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mempersiapkan layanan optimal untuk calon jemaah haji (calhaj) yang akan melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Periode 1446 Hijriah. Dari total kuota haji Indonesia 2025 sebanyak 221.000 jemaah, sebanyak 185.000 merupakan calhaj yang menabung di BSI.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, BSI telah mempersiapkan berbagai layanan untuk memudahkan pelunasan haji nasabah. Yakni melalui seluruh Kantor Cabang BSI, Net Banking, BSI Mobile dan BSI Agen yang jumlahnya mencapai lebih dari 113.000 agen.

Kementerian Agama RI telah mengumumkan periode pelunasan haji Tahap 1 pada 14 Februari-14 Maret 2025, dan Tahap 2 pada 24 Maret-17 April 2025.

KR-Istimewa

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna (kiri) didampingi RCEO BSI Regional Jakarta 1 Gunawan Arif Hartoyo (kanan) menyapa nasabah.

"BSI telah menyiapkan layanan untuk memfasilitasi pelunasan haji para jemaah. Mulai dari Kantor Cabang, BSI Net maupun Agen Laku Pandai BSI Agen dan BSI Mobile. Persiapan dan kesiapan jaringan sudah dilakukan. Kami ingin proses pelunasan haji dapat dilakukan dengan aman dan mudah dijangkau masyarakat," kata Anton, Jumat (21/2).

Tahun ini, jumlah nasabah Tabungan Haji yang berhak lunas Tahap 1 di BSI mencapai 164.905 jemaah atau sekitar 81 persen dari total jemaah haji Indonesia. Adapun dari sisi geografisnya, nasabah berhak lunas Tabungan Haji BSI terbanyak berada di Kabupaten Bogor, disusul DKI Jakarta, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Bandung. **(Ogi)-f**

Kemenag Distribusikan Kurma dari Raja Salman

JAKARTA (KR) - Menjelang bulan suci Ramadan, Kementerian Agama (Kemenag) mulai mendistribusikan kurma dari Kerajaan Arab Saudi kepada berbagai elemen masyarakat. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin kepada perwakilan lembaga-lembaga mitra distribusi, di antaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, GP Ansor, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Masjid Istiqlal dan DPR RI.

Pendistribusian ini digelar di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat Jakarta Pusat. Turut hadir Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Akhmad Fauzin serta Kepala Biro Umum Fesal Musaad.

"Kurma ini merupakan hibah dari Kerajaan Arab Saudi kepada bangsa Indonesia melalui Kementerian Agama. Kementerian Agama kemudian mendistribusikannya secara proporsional kepada berbagai entitas masyarakat Indonesia, termasuk masjid-masjid besar seperti Istiqlal dan beberapa masjid lainnya," ujar Sekjen Kemenag Kamaruddin, Jumat (21/2).

Kamaruddin juga menegaskan, kurma ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa kriteria khusus. "InsyaAllah, distribusinya akan tepat sasaran karena semuanya berhak mendapatkan manfaat dari bantuan ini," tambahnya. **(Ati)-d**

Hujan,

Sambungan hal 1

dalam aksi lanjutan bertajuk 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda. Salah satunya adalah perusahaan minuman yang menyediakan sekitar 1.500 porsi minuman yang dibagikan cuma-cuma untuk para peserta aksi.

Pemilik akun X @kootummy juga ikut membuka donasi untuk menyediakan bantuan konsumsi dan obat-obatan. "Kita menyediakan obat-obatan, oksigen juga, dan kita (juga) mencetak spanduk sama stiker. Teman-teman disabilitas yang ingin ikut aksi juga kita bantu dampingi," kata Carol, koordinator akun @kootummy.

Beberapa komunitas lainnya yang juga sudah rutin membagikan bantuan konsumsi dan logistik gratis dalam kegiatan aksi di antaranya adalah Asosiasi Ibu-Ibu. Salah satu anggota Asosiasi Ibu-Ibu, Dewi mengaku bahwa bantuan yang dikumpulkan murni tanpa membawa organisasi manapun. "Kita base-nya (basisnya) di grup WhatsApp. Jadi kalau ada aksi itu inisiatif mau bawa apa, enggak ada koordinatornya," ungkapnya.

Selain itu, basis simpatisan Anies Baswedan, @HumAniesProject juga kembali hadir membawa bantuan konsumsi dan medis, termasuk menyediakan ambulans yang ditempatkan di dekat lokasi aksi. Tidak hanya dalam bentuk logistik, Koalisi Firma Hukum Peduli Demokrasi juga menawarkan bantuan hukum gratis bagi para peserta yang sekiranya ditahan aparat.

(Ant/Has)-f

Hasto

Sambungan hal 1

Sebelumnya, penyidik KPK pada Kamis (20/2) malam melakukan penahanan terhadap Hasto selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan di Rutan KPK. Penyidik KPK menerapkan perintangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setyo mengatakan penyidik menerapkan pasal tersebut karena intervensi yang dilakukan Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) komisi antirasuah dan buron hingga saat ini. **(Ant/Has)**-f

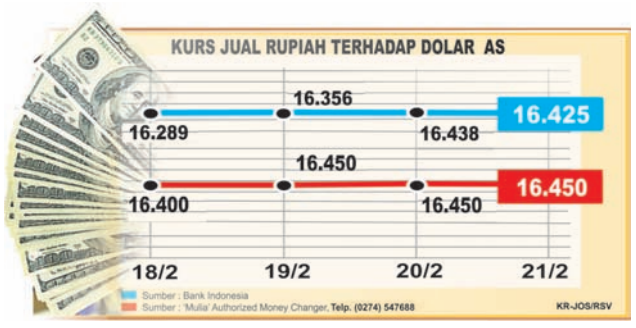

Prakiraan Cuaca — Sabtu, 22 Februari 2025

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

1 Gerakan, 13 Tuntutan

Zahrotus Sa'idah, SIKom MA
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

GERAKAN #Indonesia Gelap merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, para demonstran yang terdiri dari masyarakat sipil dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyuarakan 13 poin tuntutan yang mencakup berbagai isu krusial, seperti menuntut pemerintah untuk menciptakan pendidikan gratis melalui pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan, melakukan evaluasi penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendesak presiden untuk segera mengeluarkan UU perampasan aset bagi koruptor, serta melakukan perombakan kabinet Merah Putih yang sejauh ini dinilai terlalu 'gemuk' sehingga berdampak pada pembengkakan anggaran negara.

Sayangnya, tidak semua masyarakat mendukung gerakan tersebut, bahkan tidak sedikit yang mengartikannya sebagai bentuk kekerasan atau anarkisme. Beberapa pihak juga berspekulasi bahwa gerakan ini diinisiasi oleh kelompok oposisi pemerintah. Padahal, pada dasarnya, demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi. Masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah adalah bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan, bukan sebagai bentuk kebencian personal terhadap pemerintah atau elit politik tertentu.

Penting untuk disoroti bahwa gerakan ini adalah dampak dari kesenjangan komunikasi yang terjadi selama ini antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan melalui gerakan massa ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar lebih transparan dalam menentukan kebijakan. Salah satunya, terkait permasalahan efisiensi anggaran yang menciptakan keresahan di masyarakat karena kurangnya kejelasan dalam penggunaannya. Ketidakjelasan ini berpotensi menjadi isu yang semakin besar jika tidak segera ditanggapi dengan baik oleh pemerintah.

Apalagi, beberapa bulan terakhir, gaya komunikasi beberapa oknum di lingkungan pemerintah dinilai cukup meresahkan. Misalnya, kata 'goblok' yang diucapkan oleh Miftah Maulana Habiburrahman (Mantan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan), kata 'pe'a' yang diucapkan oleh Deddy Corbuzier (Staf Khusus baru Menteri Pertahanan), dan yang terbaru, ucapan Presiden Prabowo Subianto, 'ndasmu'. Pernyataan-pernyataan ini memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat dan semakin memperlebar kesenjangan komunikasi yang seharusnya bisa dijembatani dengan pendekatan yang lebih bijak.

Sebagai langkah solutif, pemerintah seyogyanya memanfaatkan momen ini untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat. Mengadakan dialog terbuka dengan perwakilan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil bisa menjadi solusi efektif dalam meredam kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, memberikan klarifikasi yang lebih transparan terkait kebijakan-kebijakan yang dinilai ambigu juga penting untuk menghindari spekulasi negatif yang beredar di masyarakat.

Oleh karena itu, gerakan #IndonesiaGelap sebaiknya tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai dorongan bagi pemerintah untuk lebih terbuka, responsif, dan menunjukkan keberpihakan mereka pada kepentingan rakyat. Demonstrasi yang sehat justru membutuhkan masyarakat yang kritis, bukan pasif yang hanya menerima segala kebijakan tanpa pertanyaan. Kesimpulannya, pemerintah harus mampu membangun komunikasi yang lebih harmonis dengan masyarakat demi kepentingan bersama untuk menuju Indonesia emas seperti janji politik Presiden Prabowo Subianto saat Pilpres 2024.